S
357.7207
Ibq
a
2007

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERPUSTAKAAN

SKRIPSI
ANALISIS VECTOR AUTO REGRESSION (VAR) TERHADAP KORELASI ANTARA DEFISIT APBN DAN NILAI TUKAR DI INDONESIA PERIODE 1990-2005

R. 13495
15807

Diajukan Oleh
ALAM AL IBGHANI
01033120061

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
SARJANA EKONOMI
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: ALAM AL IBGHANI
NIM	: 01033120061
JURUSAN	: EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH	: EKONOMI MONETER
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS VECTOR AUTO REGRESSION (VAR) TERHADAP KORELASI ANTARA DEFISIT APBN DAN NILAI TUKAR DI IND0NESIA PERIODE 1990-2005

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL: 31 Januari 2007

KETUA PANITIA :

Drs. H. Syaipan Djambak, MSi

NIP.131413970

TANGGAL: 31 Januari 2007

ANGGOTA:

Dra. Hj. Saadah Yuliana, MSi

NIP.131885904

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

ANALISIS VECTOR AUTO REGRESSION (VAR) TERHADAP KORELASI ANTARA DEFISIT APBN DAN NILAI TUKAR DI INDONESIA PERIODE 1990-2005

Dipersiapkan dan disusun oleh
ALAM AL IBGHANI
01033120061

telah dipertahankan di depan panitia ujian komprehensif tanggal 14 Februari 2007 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Panitia ujian komprehensif

Ketua	Anggota	Anggota
Drs.Syaipan Djambak,M.Si	Dra.Sa'adah Yuliana, M.Si	Drs.M.Komri Yusuf, M.Si
NIP.131413970	NIP.131885904	NIP.130810210

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr.Taufiq Marwa, M.Si
NIP. 132050493

MOTTO :

" Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk." (QS. An Nahl : 125)

Kupersembahkan untuk.
My father dan my mother,
aaik-aaikku serta sohib-sohibku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis hantarkan kehadirat Allah SWT, yang karena rahmat dan hidayat-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada pembimbing atas semua bimbingan dan arahan yang telah diberikan untuk penulisan ini.

Penulis mengangkat tema di bidang moneter yang sering dibicarakan dalam perkembangan perekonomian Indonesia, yaitu berkaitan dengan perkembangan nilai tukar dengan kebijakan fiskal dalam hal ini adalah Defisit Anggaran atau Defisit APBN. Penulis meneliti lanjut hubungan kedua variabel tersebut dan apakah keduanya mempunyai korelasi timbal balik atau kausalitas selama periode 1990-2005. Dalam menganalisis bentuk korelasi timbal balik antara kedua variabel tersebut, penulis menggunakan alat analisis *Vector Auto Regresssion.* Untuk mengatasi perbedaan tahun fiskal dan tahun kalender, penulis menggunakan formula yang juga digunakan oleh BPS untuk mempermudah perhitungan.

Penulis menyadari bahwa dalam analisis maupun penyajian, skripsi ini masih jauh dari sempurna,karena itu dimohon bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan berbagai kombinasi dan pilihan tehnik analisis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai uji kausalitas. Segala komentar, kritik maupun tanggapan mengenai skripsi ini akan diterima dengan senang hati.

Akhirnya, segala kesalahan dan kekurangan adalah tanggung jawab penulis. Namun, apabila terdapat kebenaran dalam skripsi ini semata hanya karena ridho dan petunjuk Allah SWT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang berkat limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Zainal Ridho Djakfar, Rektor Universitas Sriwijaya
3. Dr. Syamsurizal AK., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Dr.Taufiq Marwa, M.Si, Ketua jurusan Ekonomi Pembangunan
5. Drs Syaipan Djambak, M.Si, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Saadah Yuliana,M.Si, sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama penyusunan dan juga Bpk. Drs.M.Komri Yusuf, M.Si sebagai dosen penguji.
7. Bapak dan Mama yang telah memberikan dukungan do'a, dana, semangat untuk tetap belajar untuk menjadi lebih baik sehingga anakmu ini bisa menyelesaikan sampai jenjang pendidikan ini.
8. Adik-adikku, Adek Aga terima kasih telah membantu kakak dan semoga cepet tamat juga kuliahnya, Adek Ichan, Adek Vina dan Adek Ziki, Senyum kalian membuat kakak semakin termotivasi
9. Keluarga besar Mamaku, Om Nizal dan Tante Dian yang telah banyak membantu alam hingga menyelesaikan kuliah, kakekku yang sangat kuhormati, Om Rahman dan Tante Betty serta Om Naziri dan Tante Rosilah yang juga telah banyak jasanya hingga akhir kuliah dan tak lupa Om Pik, Tante Endang, Om Darman dan tante Sri.
10. Keluarga besar Bapakku,thanks buanget atas bantuannya selama ini
11. Sobatku satu Tim Kausalitas EP 03, Ari, Lia, kerja sama kita selama ini yang tiada henti baik siang maupun malam dari pagi hingga sore.

12. Buat sobat-sobat seperjuangan ku di medan layo, Nado,Asep, Fajar, Bowik, Amen,Rizqi,Yadi,Aprian,Imam,Sigit,Didi,Dendi,Aang,Adit,Aji,Khalil,Hafiz, Dian,Joel ganteng, Janus, Roy dan Salman Khan
13. Sisti, Shanti Kokom, Ruth,Mimin kita jadi barengan juga
14. Shanti Oktarina, Feat,Lita, Vika, Ria, Fifit, Etik, Reni, Rena,bunga,dan semua temen yang sering nokrong bareng di Paska dan temen-temen EP '03 serta temen-temenku di Ekst EP 03, Fredy, Okky, Fie, Ria, dan Titin
15. temen-temen lainnya, kita masih satu kesatuan, Asam Garam bumi Layo telah kita rasakan dan menjadi bagian yang tak terlupakan
16. Buat anak-anak medan EP 03 tetap semangat
17. Bang Amir, Bang Ajib,Bang Evan, Bang Diaz, Bang Halim, dan kakak-kakak EP 02, EP 01, dan EP 00
18. Adik-adik tingkat Terutama EP 04, Bashir, Tommy, Tri', Nurul, Tobo', Ayu,Tiwi, dan EP 05
19. Yu'ita, semua staf Admin Ekonomi, maaf penulis sering merepotin kalian
20. Kak Ariyo, thanks buanget atas bimbingan selama kuliah
21. Sobat-sobatku di OI, Jul, Sete,My dan Son, kalian sohib yang tak terlupakan dan Mbak-mbak yang bertugas di Entigo-net dan DJ-net, Perpus Paska, Perpus Layo,BPS, dan BI serta yang tak terlupakan kantin EP yang selalu kukunjungi
22. Yu' Rully, Yu' Dandik, Yu' Sita, dan fitri, atas bantuannya selama alam kuliah
23. Adik-adik sepupuku, belajar yang rajin yach.....

Akhirnya pada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan,dan masukan yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA KOMPREHENSIF iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
ABSTRAK xii

BAB I: PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang 1
I.2. Rumusan Masalah 8
I.3. Tujuan 8
I.4. Manfaat 8
I.5. Tinjauan Pustaka 9
I.6. Hipotesis 21
I.7. Metodologi Penelitian 22
I.8. Batasan Variabel 27

BAB II. : GAMBARAN UMUM

2.1. Perkembangan Defisit APBN 28
2.2. Perkembangan Hutang Luar negeri dan Cadangan Devisa 36
2.2. Perkembangan Nilai Tukar 41

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Kuantitatif korelasi timbal balik Defisit APBN dan Nilai Tukar 49

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : [illegible]
TANGGAL : 27 MAR 2007

3.1.1. Uji Akar Unit 49
3.1.2. Penentuan Lag 50
3.1.3. Inovation Accounting 51
3.1.4. Analisis Persamaan Vector Auto Regression (VAR) 55
3.2. Analisis Kualitatif korelasi timbal balik
Defisit APBN dan Nilai tukar 57

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan 61
4.2. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Defisit APBN 30
Tabel 2. Perubahan Format APBN 2005 35
Tabel 3. Perkembangan Hutang Luar Negeri, dan Cadangan Devisa 37
Tabel 4. Perkembangan Nilai Tukar 42
Tabel 5. Impulse Response 51
Tabel 6 Cholsenki Decompotion 53
Tabel 7 Persamaan VAR 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rasio Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Nasional 12
Gambar 2. Dampak Kebijakan Fiskal..... 14
Gambar 3. Skema Alur Pikir 21
Gambar 4. Impulse Response 52
Gambar 5. Cholsenki Decomposion 53
Gambar 6 Korelasi Defisit APBN dan Nilai tukar 59

Abstract

This research analyzes causality of APBN deficit and kurs in Indonesia. Data used this research is time series data during period 1990-2005. This analysis technique to account causality which used is Vector Auto Regression (VAR) analysis between APBN deficit and exchange rate. And also Adj R^2, AIC and SIC using for determining the best lag of model.

The finding of this research result is causality correlation between Deficit APBN and exchange rate is not proved. In this research, result is gotten that there is relation of causality one way namely value of rupiah exchange to dollar can influence APBN deficit but APBN deficit cannot influence the value of rupiah exchange. The regression result is the same with relative version of PPP theory from this theory that states a change in kurs is always proportional or balance with a change in ratio of price levels in both of country. The exchange value change will give reverence for APBN fort and also will influence the value of APBN realization.

Key words : APBN Deficit, Exchange rate, Vector Auto Regression

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hubungan timbal balik dari Defisit APBN dan nilai tukar di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series selama periode 1990-2005. Tehnik analisis yang digunakan untuk perhitungan timbal balik dengan menggunakan metode *Vector Anto Regression* (VAR) antara defisit APBN dan Nilai tukar. Dan juga R2, AIC, dan SIC untuk penentuan lag terbaik dari model.

Temuan dari hasil penelitian ini adalah Korelasi timbal balik antara defisit APBN dan nilai tukar selama periode 1990-2005 tidak terbukti. Korelasi antara defisit anggaran dan nilai tukar rupiah hanya bersifat satu arah yaitu nilai tukar rupiah mempengaruhi besarnya nilai defisit APBN tetapi defisit APBN tidak mempengaruhi Nilai tukar. Hasil regresi ini juga sejalan dengan yang diungkapkan dari teori PPP Versi Relatif dari teori ini yang menyatakan perubahan dalam kurs senantiasa proporsional atau sebanding dengan perubahan dalam rasio tingkat-tingkat harga di kedua negara sehingga perubahan dari harga-harga tersebut mempengaruhi nilai realisasi nilai APBN pada tahun berikutnya.

Kata Kunci : Defisit APBN, Nilai tukar, dan uji Vector Auto Regession

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah krisis memiliki suatu perbedaan yang mengubah pola pembangunan dengan berbagai perubahan kebijakan perekonomian. Sebelum krisis, pertumbuhan ekonomi relatif stabil pada angka 4 % — 7 % per tahunnya. Indonesia dipandang sebagai salah satu macan Asia. Namun keadaan ini sangat berbeda setelah krisis ekonomi melanda Indonesia. Keadaan Indonesia menjadi sangat tidak bersahabat di mana kerusuhan terjadi di berbagai wilayah, dunia usaha kehilangan daya saing, dan pasar modal kehilangan daya tariknya sehingga mengakibatkan pertumbuhan perekonomian yang rendah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan agar pembangunan ke depan dapat lebih baik.

Setiap negara dalam melakukan pembangunan perekonomiannya mempunyai pedoman supaya pembangunan tersebut dapat mengarah pada tujuannya. Berdasarkan hal tersebut Indonesia telah menetapkan arah pedomannya pada GBHN untuk 5 tahun ke depan. Pelaksanaan GBHN akan dituangkan pada Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS) yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan tahunan (Repeta).

Dalam Repeta tersebut Pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan baik aspek fiskal maupun aspek moneter untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Fiskal ialah kebijakan mengenai perpajakan, pinjaman masyarakat dan pengeluaran pemerintah untuk tujuan stabilitas dan pembangunan. Secara garis besar tujuan kebijakan fiskal sebagai berikut [1] :

- meningkatkan laju pertumbuhan investasi
- mendorong investasi secara sosial
- meningkatkan kesempatan kerja
- mempertahankan stabilitas ekonomi
- menanggulangi inflasi
- Redistribusi pendapatan nasional

Salah satu bentuk dari kebijakan fiskal setiap tahunnya adalah kebijakan dalam pengeluaran pemerintah yang dituangkan dalam bentuk APBN. APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya diterapkan dalam jangka waktu satu tahun.[2]

Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan

---

[1] Supriyanto dalam Mila MD. *Analisis Hubungan Kausalitas defisit APBN dengan tingkat Inflasi di Indonesia periode 1992-2004*, Skripsi UNSRI.2005.hal 24

[2] Ibid. Hal 2

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Untuk menyusun anggarannya pemerintah mempunyai tiga macam pilihan cara penyusunan anggaran yaitu [3] :

- Anggaran Belanja Seimbang, yaitu pengeluaran haruslah sama dengan pendapatannya.
- Anggaran belanja defisit, yaitu pengeluaran pemerintah melebihi dari pendapatannya.
- Anggaran belanja Surplus, yaitu pengeluaran pemerintah lebih sedikit dari pendapatannya.

Keuangan defisit selalu berdampak ekspansioner. Begitu pembangunan mendapatkan momentum, laju inflasi di dalam perekonomian terpacu lebih cepat yang kemudian menghendaki tambahan jumlah uang pada setiap tahapannya [4]:

a) dengan naiknya investasi secara terus menerus keseluruhan produk fisik mungkin lebih besar daripada sebelumnya sehingga dengan demikian memerlukan kenaikan persediaan uang untuk tujuan transaksi dalam jumlah uang yang sama
b) begitu perekonomian berkembang, sektor non uang secara perlahan berubah menjadi sektor uang, sehingga permintaan akan uang meningkat

---

[3] Sadono Sukirno.Ma*kro Ekonomi Moder.*Rajagrafindo.1999: Jakarta.hal
[4] Djinghan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.* Erlangga:Jakarta.1999. Hal 393

c) Proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan menghasilkan peningkatan pendapatan dan dengan demikian meningkatkan permintaan keseimbangan saldo kas (cash balance) di pihak masyarakat.

d) dalam surplus impor sebagai akibat naiknya bantuan luar negeri, permintaan uang mungkin akan tetap lebih besar.

Setiap defisit ataupun surplus, APBN memiliki dampak dalam perekonomian negara, di mana apabila terjadi surplus pada APBN akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, sedangkan bila terjadi Defisit APBN memiliki dampak ekspansi pada perekonomian. Kebijakan Defisit APBN saat ini digunakan oleh pemerintah setelah pemerintah tidak bisa mempertahankan konsep Anggaran berimbang. Pembiayaan pengeluaran pemerintahan yang melebihi penerimaan akan ditutupi oleh pinjaman luar negeri. Berkaitan dengan diberlakukannya kebijakan defisit anggaran tersebut, arahan kebijakan yang tertuang dalam GBHN Tahun 1999-2004 yaitu [5] :

- Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.
- Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien.

---

[5] Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004. Hal 3

- Menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap dan peningkatan penerimaan negara
- Melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan DPR.

Salah satu indikator makro penting dalam penyusunan APBN adalah asumsi nilai tukar rupiah terhadap US$. Nilai tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya transaksi dalam APBN yang terkait dengan mata uang asing, seperti penerimaan pinjaman dan pembayaran utang luar negeri, penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Dengan demikian, variabel asumsi dasar ekonomi makro tersebut sangat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk dana perimbangan, serta besarnya pembiayaan anggaran. Nilai tukar yang ditetapkan dalam APBN dapat pula berfungsi sebagai "*anchor*" nilai tukar sehingga dapat meredam ekspektasi masyarakat yang berlebihan. Tetapi di sisi lain, apabila asumsi tersebut jauh dari realita yang diekspektasikan pasar, maka pasar akan menolak, sehingga asumsi tersebut tidak dipercaya lagi. Dari kondisi ini, diperlukan ke hati-

hatian dalam menentukan asumsi nilai tukar sehingga dari kedua sisi, baik pemerintah maupun pelaku pasar dapat sama-sama terwakili.[6]

Sementara itu, pada saat krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang lalu terjadi perubahan sistem nilai tukar yaitu perubahan sistem nilai tukar rupiah dari sistem mengambang terkendali menjadi sistem yang mengambang bebas yang memberikan beberapa implikasi terhadap perekonomian di Indonesia. Perubahan ini sebagai dampak dari kian melemahnya nilai tukar rupiah dan semakin sedikitnya cadangan devisa untuk tetap mempertahankan tingkat nilai tukar.

Kebijakan pemerintah untuk menggunakan sistem nilai tukar mengambang bebas tersebut jelas membuktikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang lemah. Menurut Soeharsono dalam artikelnya dampak *Gejolak moneter 1997 terhadap perekonomian Indonesia 1998*, Ada lima kelemahan fundamental ekonomi Indonesia yaitu :

1. Kondisi dan posisi defisit neraca berjalan yang cenderung terus meningkat, dampak kenaikan ekspor yang lamban di bandingkan dengan defisit neraca jasa yang terus meningkat. Ketergantungan industri komoditi ekspor terhadap bahan baku impor yang makin besar.
2. Posisi cadangan devisa yang bersumber dari utang luar negeri dan arus penanaman modal asing (transaksi modal masuk) bukan bersumber dari surplus neraca perdagangan.

[6] Tri Wibowo dan Hidayat Amir. *Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah*, Kajian Ekonomi dan keuangan Volume 9 Nomor 4. 2005. hal 18

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS GUNADARMA

3. Pertumbuhan ekonomi dipicu melebihi kapasitas tabungan dalam negeri, utang luar negeri kumulatif membengkak tidak terkendali, utang sektor swasta jangka pendek diinvestasikan pada sektor yang tidak menghasilkan devisa.
4. Kondisi sektor moneter– perbankan yang kurang sehat
5. Suku bunga kredit yang tinggi

Ekspektasi perubahan nilai tukar di masa datang menjadi hal yang penting semenjak nilai tukar mengambang diberlakukan. Adanya ekspektasi depresiasi nilai tukar di masa datang akan menyebabkan arus modal keluar yang akan memperburuk transaksi modal. Demikian pula fluktuasi nilai tukar menjadi ukuran kestabilan perekonomian suatu negara. Gejolak nilai tukar yang berlebihan tidak sesuai dengan sasaran kepentingan jangka panjang, karena ketidakstabilan dapat mendistorsi tingkat daya saing ekonomi, mengurangi efisiensi alokasi sumber daya dan meningkatkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas didapat adanya suatu kondisi di mana pemerintah dihadapkan dua permasalahan yang sangat penting dalam perekonomian bangsa yaitu permasalahan defisit APBN dan nilai tukar. Defisit APBN memiliki pengaruh terhadap ekspansi dalam perekonomian sedangkan nilai tukar berhubungan dengan perdagangan luar negeri. Di satu sisi defisit APBN akan meningkatkan persediaan valas dengan asumsi pemerintah membiayai pembangunan dengan memanfaatkan pinjaman luar negeri sedangkan di sisi lain akan meningkatkan beban hutang dalam bentuk valas dikemudian hari. Sedangkan fluktuasi nilai tukar akan memberikan

perubahan dalam menentukan besarnya nilai pembayaran pinjaman luar negeri dan pengeluaran pemerintah lainnya yang dibiayai oleh APBN. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk membahasnya lebih lanjut tentang hubungan kedua variabel tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas ada tidaknya korelasi timbal balik (*interrelationship*) antara defisit anggaran dan nilai tukar rupiah selama periode 1990-2005 ditinjau dari analisis Vektor Auto Regression.

1.3. Tujuan

Dari Rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- untuk mengetahui kausalitas antara defisit APBN dan nilai tukar Rupiah selama periode 1990-2005

1.4. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh yaitu :

- Manfaat akademis

  Sebagai informasi mengenai perkembangan fluktuasi nilai tukar di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran bagi mahasiswa yang akan meneliti hubungan antara defisit APBN dengan Nilai tukar di Indonesia

- Manfaat operasional

  Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam melakukan penerapan kebijakan dalam sektor keuangan.

1.5. Tinjauan Pustaka
1.5.1. Landasan teori
1.5.1.1. Teori Pengeluaran pemerintah

Analisis makroekonomi yang dikembangkan oleh Keynes sangat menekankan peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian sehingga dapat melakukan kegiatannya dengan lebih stabil dan selalu menuju ke tingkat kesempatan kerja penuh.[7]

Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada awal perkembangan ekonomi, menurut mereka, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total relatif lebih besar. Hal itu disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat.[8]

Pemerintah adalah suatu lembaga yang mengemban amanat rakyat untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Secara khusus, pemerintah dapat merepresentasikan suatu negara. Pemerintah suatu negara wajib menjalankan tiga fungsi pemerintah, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pemerintah membutuhkan dana. Dalam mengatur anggaran pengeluaran dan penerimaan, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal. Operasionalisasi kebijakan ini dapat berupa pengeluaran konsumsi, pengeluaran

---

[7] Sadono Sukirno. *Makro Ekonomi Modern.* Rajagrafindo: Jakarta.2000. hal 122
[8] Dumairy. *Perekonomian Indonesia.* Erlangga: Jakarta. 1996. hal 163

investasi dan pengelolaan pendapatan. Keseluruhan fungsi fiskal ini dapat tercapai secara berkelanjutan jika penerimaan negara (pemerintah) sesuai dengan kebutuhan pengeluarannya. Jika tidak, dibutuhkan alternatif pembiayaan tambahan yang mencakup pendanaan internal dan eksternal. Sehubungan dengan pendanaan eksternal, utang menjadi suatu alternatif kebijakan pembiayaan negara. Lebih lanjut menurut Todaro secara khusus berpendapat bahwa *saving gap* (kesenjangan tabungan dan kebutuhan investasi) dapat menjadi penyebab utang luar negeri. Jika akumulasi kapital domestik menurun, maka diperlukan modal dari luar negeri untuk mengolah sumber daya domestik tersebut. Todaro menyebutnya sebagai *imported capital*. Selain itu, defisit transaksi berjalan dalam neraca perdagangan juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan kapasitas pembayaran Perhatian terhadap utang dan defisit memiliki arti penting dalam analisis keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan karena defisit yang dibiayai oleh bank sentral dengan pencetakan uang akan mendorong terjadinya inflasi. Sementara defisit yang dibiayai dengan surat utang akan menimbulkan efek *crowding-out* dengan asumsi-asumsi tertentu.[9]

Secara teoritik paling tidak ada tiga kelompok yang mencoba menjawab permasalahan pengaruh defisit anggaran terhadap perekonomian yaitu Ricardian, Neo Klasik, dan Keynesian. Kelompok pertama, yakni kaum Ricardian, dengan teorinya *Ricardian Equivalence (RE)* berpendapat bahwa defisit anggaran tidak akan mempunyai pengaruh apa-apa terhadap perekonomian. Kelompok kedua

[9] Tim FE UGM. *Studi Manajemen Utang Luar Negeri dan Dalam Negeri Pemerintah dan Assessment terhadap optimal borrowing*:FE UGM:Yogyakarta. 2004.Hal 10

adalah kelompok Neo Klasik. yang menyimpulkan bahwa dalam kondisi kesempatan kerja penuh, defisit anggaran yang permanen akan menyebabkan investasi swasta tergusur (*crowding-out*). Secara umum kaum Neoklasik berpendapat bahwa defisit anggaran akan merugikan perekonomian. Kelompok ketiga adalah kaum Keynesian yang berpendapat bahwa defisit anggaran mempengaruhi perekonomian. Kelompok Keynesian mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi mempunyai pandangan jangka pendek (*myopic*), hubungan antargenerasi tidak erat, serta tidak semua pasar selalu dalam posisi keseimbangan. Salah satu ketidakseimbangan terjadi di pasar tenaga kerja, dan dalam perekonomian selalu terjadi pengangguran.[10]

Berdasarkan pengamatan empiris oleh Adolph Wagner terhadap negara-negara Eropa, AS dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat yang dikenal dengan hukum aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat (*law of ever increasing state activity*) yang dirumuskan sebagai berikut [11]:

$$\frac{GpC}{YpCt} > \frac{GpC}{YpCt} > \frac{GpC}{YpCt} > \ldots\ldots\ldots > \frac{GpCt\text{-}n}{YpCt\text{-}n}$$

Keterangan :

GPC = Pengeluaran Pemerintah Perkapita
YpC = Produk atau Pendapatan Nasional perkapita
t = Indeks waktu

---

[10] Maryatmo. *Dampak Moneter Kebijakan deisit anggaran pemerintah dan peranan asa nalar dalam simulasi model makro-ekonomi Indonesia (1983-2002).* Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankkan, September 2004.2004. hlm 299

[11] Dumairy. Op.cit. hal 162

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu :

- Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan
- Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat
- Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi
- Perkembangan demokrasi
- Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan

Selanjutnya Wagner menyatakan persoalan yang belum terpecahkan dalam pengeluaran pemerintah ialah- dalam jangka panjang- kurva rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional akan berpola *Gompertzian* (yang berarti suatu "batas maksimum" tertentu G/Y), atau berpola *parabolik* (berarti sampai dengan suatu titik waktu tertentu rasio G/Y akan kembali menurun), sebagaimana Gambar 1 berikut :

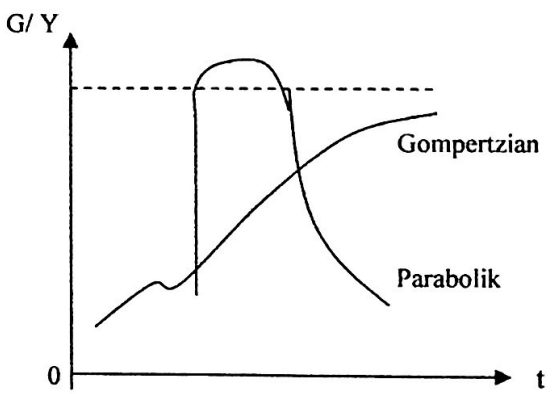

Gambar 1 Kurva Rasio Pengeluaran Pemerintah terhadap pendapatan nasional

Dampak dari pertambahan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan perubahan pada pendapatan nasional. Dimisalkan pendapatan nasional yang dicapai dapat ditentukan, yaitu seperti yang ditunjukkan persamaan berikut[12] :

$$Y1 = \frac{1}{1-b\,(1-t)}\ (a+Io+G0)$$

Pertambahan pengeluaran pemerintah yang dimisalkan kenaikannya adalah sebanyak Δ G, akan menaikkan pendapatan nasional menjadi :

$$Y1 = \frac{1}{1-b\,(1-t)} = (a+Io+Go+\Delta G)$$

Kenaikan pendapatan nasional (Δ Y) yang terwujud sebanyak Y1-Yo = Δ Y, dapat dihitung yaitu :

$$Y1-Yo = \Delta Y = \frac{1}{1-b\,(1-t)}\ (a+Io+Go+\Delta G) - \frac{1}{1-b\,(1-t)}\ (a+Io+Go)$$

atau $Y1 = \frac{1}{1-b\,(1-t)}\ (\Delta G)$

Secara Grafik dari kebijakan Fiskal melalui pertambahan dalam pengeluaran pemerintah ditunjukkan dalam kurva 2, Pengeluaran agregat mula-mula adalah AEo. Keseimbangan tercapai di Eo dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan pengeluaran pemerintah sebanyak ΔG akan menaikkan AE_0 menjadi AE_1. Keseimbangan baru adalah E1 dan pendapatan nasional yang baru adalah Y1.

---

[12] Sadono Sukirno. Op.cit. Hal 122

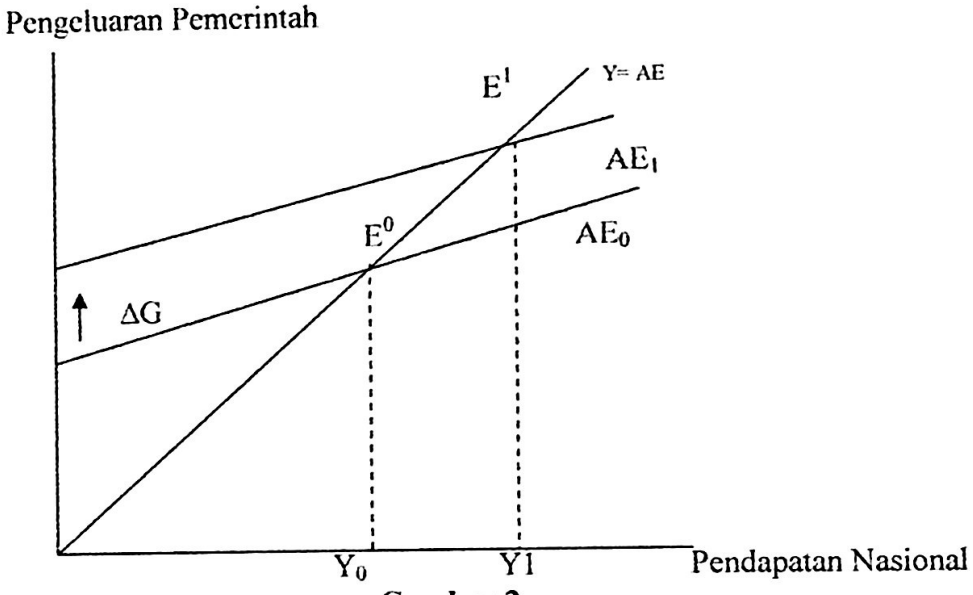

Gambar 2
Dampak Kebijakan Fiskal

1.5.1.2. Teori Nilai Tukar

1.5.1.2.1. Teori Purchasing Power Parity (PPP)

Teori Purchasing Power Parity merumuskan gejala kurs antara dua mata uang adalah identik dengan rasio dari tingkat harga umum di kedua negara yang bersangkutan. Secara garis besar teori PPP menyatakan bahwa pasar valuta asing berada dalam kondisi keseimbangan apabila semua deposito/ simpanan dalam berbagai valuta asing menawarkan tingkat imbalan yang sama. Adapun kondisi di mana perkiraan tingkat imbalan yang ditawarkan semua simpanan dalam berbagai valuta asing sama (bila dihitung dengan satu satuan mata uang yang sama) disebut dengan kondisi paritas tingkat suku bunga (interest parity)

Versi Relatif dari teori ini menyatakan perubahan dalam kurs senantiasa proporsional atau sebanding dengan perubahan dalam rasio tingkat-tingkat

harga di kedua negara. Apabila terjadi perubahan harga yang berbeda di kedua negara, maka kurs tersebut haruslah mengalami perubahan pula. Misalnya, kalau harga-harga di Indonesia naik tiga kali dan di Amerika Serikat hanya naik dua kali, maka kursnya akan menjadi :

$$\frac{1.000}{\$\ 1} \times \frac{3}{2} = \frac{Rp.1.500,00}{\$\ 1}$$

Selama tidak ada perubahan-perubahan dalam biaya-biaya transportasi, hambatan perdagangan, atau rasio antara barang yang diperdagangkan dengan barang tidak diperdagangkan,serta tidak ada perubahan-perubahan struktural di kedua negara tersebut, maka perubahan kurs kurang lebih akan sebanding dengan perubahan rasio tingkat harga umum yang berlaku di kedua negara yang bersangkutan.

Menurut MacDonald dan Taylor, bila harga-harga barang amat fleksibel maka doktrin PPP akan berlaku dalam jangka pendek. Dengan mempergunakan persamaan dasar model moneter-harga fleksibel keduanya menemukan bahwa penawaran uang domestik relatif terhadap stok uang luar negeri berkorelasi positif dengan nilai tukar mata uang domestik yang berarti setiap kenaikan penawaran uang domestik relatif terhadap stok uang luar negeri akan menyebabkan mata uang domestik terapresiasi. Variabel pendapatan riil domestik berkorelasi positif dengan nilai mata uang domestik yang berarti peningkatan pendapatan riil akan mengakibatkan apresiasi mata uang domestik.

harga di kedua negara [illegible]

negara, maka [illegible]

kalau harga barang di [illegible] karena

dua kali, maka [illegible] penyesuaian

[illegible] tidak dipengaruhi

Selama tidak [illegible] fungsi dari pendapatan.

hambatan perdagangan [illegible] oleh cadangan devisa yang

barang tidak diperdagangkan [illegible] mencapai ekuilibrium *overall*

kedua negara tersebut, maka [illegible] dapat melaksanakan fungsinya

dengan perubahan rasio [illegible] devisa. Menurunnya cadangan devisa

bersangkutan [illegible] *counter productive* bagi kebijakan moneter

Menurut Mac[illegible] akibat ekspansi kebijakan moneter pada akhirnya

maka dokum[illegible] pendapatan riil masyarakat.

persamaan [illegible] suku bunga dalam negeri yang cukup tinggi terhadap

penawaran [illegible] yang seharusnya dapat mempengaruhi efektivitas

[illegible] juga tidak dapat efektif karena berkurangnya cadangan

penawaran [illegible]

menyesuaikan fiskal dalam sistem nilai tukar tetap dan dalam *perfect capital*

[illegible] justru efektif karena eskpansifnya pengeluaran Pemerintah akan

[illegible] suku bunga dan investasi sehingga pendapatan riil masyarakat

[illegible]. Naiknya suku bunga akan mendorong aliran modal masuk dan

[illegible] BOP menjadi surplus sehingga cadangan devisa meningkat dan jumlah

uang beredar bertambah. Kebijakan fiskal semakin kurang efektif jika elastisitas aliran modal internasional semakin kecil terhadap suku bunga dalam negeri. Dalam keadaan *perfect capital immobility*, kebijakan fiskal tidak efektif sama sekali karena suku bunga tidak memiliki hubungan dengan aliran modal internasional. Dalam jangka panjang, ekspansi operasi Pemerintah tidak dapat meningkatkan pendapatan riil masyarakat karena *overall* BOP yang defisit harus diimbangi dengan kontraksi moneter akibat menurunnya cadangan devisa.

b. Sistem Kurs Mengambang Terkendali

Dalam sistem mengambang terkendali, otorita moneter masing-masing negara dibebani kewajiban untuk melakukan intervensi terhadap pasar-pasar valas dalam rangka mendukung fluktuasi dalam jangka pendek tanpa mengganggu kecenderungan jangka panjangnya. Penerapan kebijakan ini mensyaratkan otorita moneter dari negara yang bersangkutan untuk menjual valuta asing (membeli valuta mata uang domestik) atau mengurangi cadangan internasionalnya untuk meredam kecenderungan depresiasi mata uang negara tersebut, serta menjual valuta asing (guna menyerap mata uang domestik) atau memperbesar cadangan internasional setiap kali terjadi kelebihan penawaran valuta asing berjangka pendek di pasar dalam rangka meredam kecenderungan apresiasi mata uang nasional. Meskipun jumlah cadangan internasional yang dikeluarkan atau yang ditambahkan tidak sebesar kelebihan atau permintaan valuta asing dalam jangka pendek, hal tersebut biasanya sudah cukup untuk

menghentikan fluktuasi kurs jangka pendek tanpa mempengaruhi kecenderungannya dalam jangka panjang.

c. Sistem Mengambang Bebas

Model Fleming-Mundell dapat dipakai untuk memberikan landasan teori pengendalian moneter dalam sistem nilai tukar fleksibel. Teori pengendalian moneter dapat menggunakan pendekatan *price targeting* maupun *quantity targeting*. Sasaran akhir dari kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar fleksibel biasanya merupakan sasaran tunggal yakni inflasi. Hal ini sejalan dengan prinsip satu instrumen satu target. Cara pencapaian sasaran inflasi tersebut dapat melalui pendekatan *inflation targeting* maupun bukan. Dalam sistem nilai tukar yang fleksibel, *overall* BOP selalu ada dalam posisi ekuilibrium artinya neraca transaksi berjalan (CA) akan selalu sama besarnya dengan neraca transaksi modal (KA). Hal ini dapat dijelaskan melalui mekanisme sederhana sebagai berikut[13]:

a. Apabila *overall* BOP mengalami surplus, nilai tukar Rupiah akan mengalami apresiasi sehingga mendorong impor dan mengurangi daya saing sehingga ekspor turun. Akibatnya neraca transaki berjalan akan memburuk sampai *overall* BOP mencapai ekuilibirum.
b. Sebaliknya defisit *overall* BOP akan mendorong nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi sehingga impor turun dan daya saing meningkat

[13] Wijoyo Susanto dan Iskandar. *Pengendalian Moneter dalam sistem nilai tukar yang fleksibel.* Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. September. 1999. Hal 6

sehingga nilai ekspor meningkat. Alhasil, neraca transaksi berjalan akan membaik sehingga *overall* BOP akan ekuilibrium

1.5.2. Kerangka Pemikiran

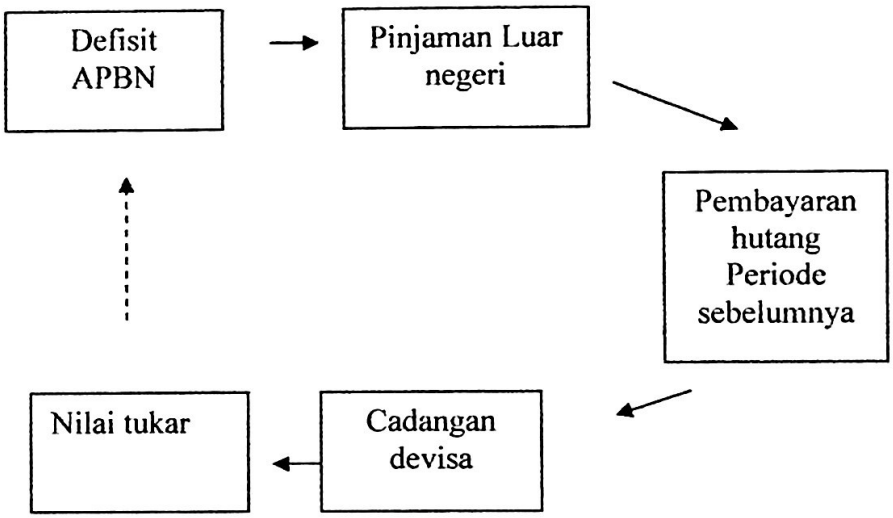

Gambar 3
Skema Alur Pikir

Dalam rangka mengejar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah mengambil kebijakan menggunakan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan. Pada kenyataannya kebijakan ini sudah cukup lama digunakan di Indonesia, meskipun Indonesia pernah menggunakan berbagai sistem anggaran baik kebijakan anggaran berimbang maupun defisit. Kebijakan tersebut menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk membayar setiap pinjaman pada saat jatuh tempo sehingga setiap tahunannya Indonesia harus membayar cicilan atau bunga dari pinjaman luar negeri yang telah diberikan. Hal ini akan mempengaruhi ketersediaan cadangan devisa. Semakin besar devisa yang digunakan akan semakin mengurangi persediaan valas (dollar US) sehingga akan mempengaruhi nilai tukar

rupiah terhadap dolar. Begitupun dengan nilai tukar, bila nilai tukar terus menerus terdepresiasi maka besarnya APBN yang dianggarkan akan selalu mengalami peningkatan.

1.5.3. Penelitian Sebelumnya

Dari hasil penelitian Maryatmo (2002:317) dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dapat mempengaruhi perekonomian (*Fiscal policy does matter*). Temuan tersebut dibuktikan baik melalui uji kausalitas, maupun dalam uji persamaan *reduced form*. Dalam uji kausalitas dibuktikan bahwa defisit anggaran mempengaruhi suku bunga, dalam uji *reduced form* dibuktikan bahwa dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek penerimaan pemerintah (TXREV_M) mempengaruhi suku bunga. Dari uji *reduced form* yang sama, dapat dibuktikan bahwa dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah (SPENL_M) mempengaruhi tingkat harga dan kurs, sedangkan dalam jangka panjang hanya akan mempengaruhi tingkat harga. Ada hubungan timbal balik antara variabel fiskal dan moneter. Dari uji kausalitas dapat dibuktikan bahwa defisit anggaran (DEFNL) akan mempengaruhi suku bunga (RRRPL), sebaliknya defisit anggaran dipengaruhi oleh tingkat harga (CPI) dan nilai tukar rupiah (EXRPL). Tersirat dalam model, hubungan timbal balik antara instrumen fiskal dan moneter bersifat saling menghilangkan. Jika dampak defisit anggaran bersifat ekspansif, sehingga meningkatkan suku bunga, tingkat harga, dan memperkuat nilai tukar rupiah, maka sebaliknya peningkatan suku bunga, tingkat harga, dan apresiasi rupiah mempunyai dampak yang kontraktif dalam perekonomian. Para pengusaha sangat peka dan

responsif terhadap perbedaan antara informasi Defisit anggaran yang mereka terima dan yang aktual terjadi di lapangan. Mereka mengantisipasi secara negatif ketidaksesuaian antara informasi awal dengan realisasi defisit anggaran tersebut, sehingga menetralisasi sasaran kebijakan yang diharapkan.

Hasil penelitian Didi Nuryadin dan Bagus Santoso (2004:291) menunjukkan adanya hubungan antara variabel-variabel yang dipilih dalam mempengaruhi nilai tukar, baik dalam model neraca pembayaran maupun model moneter. Secara umum variabel-variabel yang digunakan menunjukkan koefisien regresi dengan arah yang sesuai harapan teori, atau kesesuaian hipotesis pada model neraca pembayaran dan model moneter terpenuhi. Namun, variabel cadangan internasional (DLTR) dan pendapatan nasional (DLY) mengalami perbedaan arah hubungan antara pada masa sebelum dan masa krisis. Pada masa sebelum krisis variabel cadangan internasional (DLTR) menunjukkan arah yang tidak konsisten dengan teori dan berubah arah pada masa krisis, sedangkan variabel pendapatan nasional (DLY) menunjukkan arah hubungan yang konsisten dengan teori pada masa sebelum krisis dan berubah arah pada masa krisis.

1.6. Hipotesis

Terdapat korelasi timbal balik (*interrelationship*) antara defisit anggaran dan nilai tukar rupiah selama periode 1990-2005 ditinjau dari analisis Vektor Auto Regresion. Depresiasi Nilai tukar mendorong defisit APBN semakin meningkat, sehingga membutuhkan adanya apresiasi nilai tukar rupiah sehingga defisit APBN

dapat berkurang. Sedangkan defisit APBN mempengaruhi besarnya nilai tukar rupiah.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Ruang Lingkup

Kajian dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada analisis kausalitas Defisit APBN dengan Nilai Tukar di Indonesia selama periode 1990-2005

1.7.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam makalah ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu dari Laporan Keuangan Bank Indonesia berbagai edisi, Badan Pusat Statistik, Depkeu, dan buku-buku yang berkaitan dengan perkembangan moneter dan jurnal-jurnal yang membahas perkembangan perbankan Indonesia.

1.7.3. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kualitatif dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal artikel dan berbagai kajian yang berhubungan dengan model dalam penelitian. Teknik analisis kuantitatif untuk menganalisa hubungan kausalitas dengan menggunakan model Vector Auto Regresion (VAR).

a. Cara menghitung defisit APBN

1. Pn = Pjk + Npjk + Hb
2. G = BPP + DP + DKP
3. Def = Pn- G

Keterangan :

Pn	= Penerimaan Negara	Pjk	= Pajak
Npjk	= Non Pakak	Hb	= Hibah
G	= Pengeluaran negara	BPP	= Belanja Pemerintah Pusat
DP	= Dana perimbangan	DKP	= Dana Otonomi Khusus
Dft	= Defisit APBN		

b. Cara mengubah perhitungan APBN dari tahun fiskal menjadi tahun kalender

APBN menurut Tahun Fiskal dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret, sedangkan tahun kalender dimulai dari bulan Januari sampai dengan 31 Desember. Pada tahun 2000 format APBN diubah dari tahun fiskal menjadi tahun kalender sehingga format tahun-tahun sebelumnya dilakukan penyesuaian guna mempermudah perhitungan.

Dalam perhitungan APBN ini Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y1 = \frac{3}{4}(Yt) + 1/4\ (Y_{t-1})$$

Keterangan :

Y1 = APBN tahun Kalender

Yt = APBN tahun t

Yt-1= APBN tahun t-1

c. Tahapan dan Cakupan Analisis VAR

Vektor Auto Regresion merupakan alat analisis atau metode analisis yang bisa digunakan untuk memahami adanya hubungan timbal balik/ kausalitas antara variabel-variabel ekonomi. Setiap variabel dalam analisis VAR selain dipengaruhi

oleh nilai masa lalunya dimasa lampau, juga dipengaruhi oleh nilai masa lalu semua variabel endogen secara bersama-sama dalam model yang diamati.[14]

Pada dasarnya analisis VAR meliputi uji akar unit/ ADF, uji penentuan lag, inovation accounting. Kemudian hasil dari pengujian tersebut dijadikan dasar dalam penentuan persamaan VAR.[15]

1). Uji akar unit (*Unit Root Test*)

Uji akar unit ini digunakan untuk melihat apakah data yang diamati stationer atau tidak. Test ini sebenarnya hanya merupakan pelengkap dari analisis VAR, mengingat tujuan dari analisis VAR adalah untuk menilai adanya hubungan timbal balik di antara variabel-variabel yang diamati, dan bukan test untuk data. Akan tetapi, apabila data yang diamati adalah stationer, hal ini akan meningkatkan akurasi dari analisis VAR.

2). Penentuan Lag

Untuk mengetahui penentuan lag terbaik maka terdapat serangkaian alat test yang digunakan diantaranya penentuan indikator R^2 adjusted pada persamaan yang lebih tinggi dibanding persamaan lainnya, kedua dengan melihat *Akaike Information Criterion* (AIC) dan *Schwarz Information Criterion* (SIC) yang terendah dari persamaan tersebut .[16]

---

[14] Yonathan Hadi.*Analisis Vector Auto Regresion Terhadap korelasi Pendapatan nasional dan Investasi Pemerintah 1983/1984-1999/2000.*Jurnal Keuangan dan Moneter Depkue.2003.Hal 109.

[15] Ibid. Hal 110.

[16] Nachrowi dan Hardius Usman. 2006.*Ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan.* LPFEUI Hal 299.

3). Innovation Accounting

Pada dasarnya test ini digunakan untuk menguji struktur dinamis dari sistem variabel dalam model yang diamati, yang dicerminkan oleh variabel inovasi (*innovation variable*). Dengan kata lain, test ini merupakan test terhadap variabel inovasi (*innovation variable*). Test ini terdiri dari:

a. *The Impulse Responses*: Untuk melihat efek gejolak (*shock*) suatu standar deviasi dari variabel invovasi terhadap nilai sekarang (*current time values*) dan nilai yang akan datang (*future values*) dari variabel-variabel endogen yang ter-dapat dalam model yang diamati.

b. *The Cholesky Decomposition*: *The Cholesky Decomposition* atau biasa disebut juga dengan *The Variance Decomposition* membe-rikan informasi mengenai variabel inovasi yang relatif lebih penting dalam VAR. Pada dasarnya test ini merupakan metode lain untuk meng-gambarkan sistem dinamis yang terdapat dalam VAR. Test ini digunakan untuk menyusun perkiraan *error variance* suatu variabel, yaitu seberapa besar perbedaan antara *variance* sebelum dan sesudah *shock*, baik *shock* yang berasal dari diri sendiri maupun *shock* dari variabel lain.

4). Analisis Persamaan VAR

Dalam menganalisis pengaruh defisit APBN (Dft) terhadap nilai tukar digunakan fungsi matematis sebagai berikut :

$$Ntr = f(Dft)$$

Sedangkan analisis pengaruh nilai tukar (Ntr) terhadap defisit (Dft) digunakan fungsi matematis sebagai berikut :

$Dft = f(ntr)$

Untuk memahami analisis VAR, perhatikan sistem dua variabel sederhana (*the simple bivariate system*) berikut:

$$NTR = \alpha_{1i} + \beta_{1i} Dft_{t-n} + \beta_{1i} NTR_{t-n} + Ut \quad \ldots\ldots (1)$$

$$Dft = \alpha_{2i} + \beta_{2i} DFTt\text{-}1 + NTR_{t-1} + Vt \quad \ldots\ldots (2)$$

Keterangan :

NTR = nilai tukar	α_{1i} = konstanta
Dft_{t-n} = Defisit APBN t-n	β_{1i} = parameter
NTR_{t-n} = Nilai tukar rupiah t-n	Ut = error term
DFT = Defisit APBN	α_{1i} = konstanta
Dft_{t-n} = Defisit APBN t-n	β_{1i} = parameter
NTR_{t-n} = Nilai tukar rupiah t-n	Vt = error term

Untuk memperkuat hasil persamaan VAR, maka dilakukan uji kausalitas Granger untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kausalitas antar variabel.[17] Prosedur uji kausalitas didasarkan pada tingkat keakuran penjelas regresi (*fitting of the regresion*), sehingga belum menunjukkan kekuatan controll variabel dalam mempengaruhi dependen variabel. Oleh karena itu untuk mendukung hasil tersebut digunakan F-test.

Untuk mengetahui hubungan kausalitas antara defisit anggaran dan nilai tukar digunakan regresi berdasarkan dua model di atas, maka digunakan perangkat lunak Eviews Versi 4.

---

[17] Nachrowi,Op.cit. Hal 289

1.8. Batasan Variabel

- Defisit APBN adalah ketidakseimbangan antara penerimaan APBN dengan pengeluaran APBN, dengan total pengeluaran APBN lebih besar daripada penerimaan APBN pada tahun yang sama.
- APBN adalah suatu daftar pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun.
- Cadangan Devisa adalah keseluruhan devisa yang dapat digunakan untuk menunjang perdagangan dan hubungan dengan luar negeri selama 1990-2005.
- Pinjaman luar negeri adalah sejumlah hutang yang digunakan dalam rangka pembiayaan defisit APBN selama 1990-2005
- Cicilan Pinjaman adalah kewajiban yang timbul dari setiap pinjaman luar negeri yang di bayar pemerintah secara bertahap selama 1990-2005
- Nilai tukar adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar selama 1990-2005

DAFTAR PUSTAKA

Djinghan. 1999. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Erlangga:Jakarta.

Sadono Sukirno, 2000. *Makro Ekonomi Modern. Rajagrafindo*: Jakarta

Damodar Gujarati.1995. *Basic Econometric*. McGrawl: New York

Yonathan Hadi.2000. *Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi dan inflasi.*

Nopirin.Ph.D. 2000. *Ekonomi Moneter II.* BPFE UGM :Yogyakarta

Tri Wibowo dan Hidayat Amir. 2005. *Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah.* Kajian Ekonomi dan keuangan Volume 9 Nomor 4.

Wijoyo Susanto dan Iskandar.1999. *Pengendalian Moneter dalam sistem nilai tukar yang fleksibel.* Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. September 1999.

Dumairy. 1996.*Perekonomian Indonesia.* Erlangga: Jakarta.

Tim FE UGM. 2004. *Studi Manajemen Utang Luar Negeri dan Dalam Negeri Pemerintah dan Assessment terhadap optimal borrowing*:FE UGM:Yogyakarta.

Maryatmo. 2004. *Dampak Moneter Kebijakan defisit anggaran pemerintah dan peranan asa nalar dalam simulasi model makro-ekonomi Indonesia (1983-2002).* Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankkan, September 2004

Nachrowi D Narchrowi dan Hardius Usman. 2006.*Ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan.* LPFEUI: Jakarta

Syahrir Ika dan Anggunan P Samosir. *Analisis Privatisasi BUMN dalam rangka pembiayaan APBN.*Kajian Ekonomi dan keuangan. 2002.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2004 dan Rencana kerja tahun 2005. Depkue

Makhlani.2000.*Pola Pembangunan Ekonomi dengan Pinjaman Luar Negeri (Pelajaran dari Kasus Indonesia : Pra krisis ekonomi 1970-1997).* www. Fiskal Depkue.go.id.

Made Suardini dan Miranda S. Goeltom.*Analisis Dampak In tervensi Bank Sentral Dalam penetapan Nilai tukar terhadap Ekppor Impor Indonesia.* Ekonomi dan Keuangan Indonesia. 1991.Hal 80

Almizan Ulfa. *Indonesia satu dan stabilitas kurs rupiah: analisis stabilitas exchange rates Indonesia pasca krisis 1997.* Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2003.

Didi Nuryadin dan Bagus Santoso 2004. *Analisis aplikasi model neraca pembayaran dan model moneter terhadap nilai tukar rupiah/ dolar, periode 1980.1 – 2000.4.* Buletin Ekonomi dan moneter: Jakarta.

Mila. 2005.*Kausalitas Defisit APBN dan Inflasi di Indonesia.* Skripsi UNSRI:Indralaya

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Bank Indonesia : Jakarta

Laporan Perekonomian Indonesia 2004. Bank Indonesia : Jakarta

Laporan Perekonomian Indonesia 2005. Bank Indonesia : Jakarta

Nota keuangan 2005. Depkue.2005

Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2004 dan Rencana kerja tahun 2005. Depkue : Jakarta

www. Fiskal Depkue.go.id

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004.